



Judul : DPR&Pemerintah belum kompak. soal Tapera belum reda
Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 7

DPR & Pemerintah Belum Kompak Soal Tapera Belum Reda

DPR dan Pemerintah belum kompak soal penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera. DPR masih mengkritik keras rencana pemotongan gaji rakyat untuk Tapera, sementara pemerintah terus berupaya kasih penjelasan manfaat Tapera.

Dalam rapat Paripurna di DPR, program Tapera kembali mendapat penolakan dari anggota dewan. Penolakan disuarakan oleh Rieke Diah Pitaloka. Anggota Komisi VI DPR ini dengan tegas meminta program yang tertuang dalam Per-

aturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 itu, dibatalkan.

Pemeran Oneng di Sitkom Bajaj Bajuri ini, beralasan, program Tapera yang bakal memotong gaji pegawai 2,5 persen tiap bulan tersebut, terbukti bermasalah. Menurutnya, program yang diujinya bernama Bapertarum tersebut memiliki banyak persoalan.

Salah satunya, kata Rieke, seperti disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan audit BPK tahun 2021, Rieke mengatakan,

tergerak.

"Harus dan wajib ditingkatkan, hal ini bisa diperoleh melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang semakin tinggi di dalam perekonomian nasional," pungkasnya.

Mendengar pujian ini, partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menyambut dengan baik. Salah satunya datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Herzaky mengatakan, sejak awal di internal KIM memang sudah menggodok program makan bergizi gratis lewat berbagai kajian mendalam. Antara lain, melihat program ini telah berhasil meningkatkan kualitas SDM di negara-negara lain.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 7

pengembangan SDM. Dan kita sudah *on the track*," ulasnya, semalam.

Di jagat maya, warganet ikut mengomentari soal program unggulan Prabowo-Gibran. Mereka mengakui bahwa rakyat Indonesia saat ini memang membutuhkan makanan bergizi, agar kualitasnya meningkat dan mampu menyamai otak luar negeri.

"Setuju banget nih, dengan adanya makan makanan yang bergizi plus gratis," cuit @AflakhaLaili.

"Ini memang benar dan harus jadi prioritas pemerintahan Prabowo. Tapi kalau hanya makan bergizi saja tidak akan besar efeknya. Ini harus dipadani dengan perhatian pada bidang pendidikan. Masa wajib belajar harus terlaksana dan bebas biaya setidaknya di sekolah-sekolah negeri," ujar akun @Nicke9662734599. ■ BYU